

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2004 s/d 2007**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan**



Oleh:

**RANTI ARIYANI**

**06096040**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**





No. Alumni Univesitas	Ranti Ariyani	No. Alumni Fakultas
-----------------------	---------------	---------------------

a). Tempat/Tgl. Lahir: Bukittinggi, 06/04/1983 b) Nama Orang Tua: Zulhadi dan Bismiwati c) Fakultas: Politeknik Negeri Padang d) Jurusan: Akuntansi e) NIM: 06096040 f) Tgl Lulus: 16 Juli 2009 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK: 3,87 i) Lama studi: 32 bulan k) Alamat orang tua: Jln. Asra No. 63 Tunggul Hitam Padang

**Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004 s/d 2007**  
Tugas Akhir DIV oleh: Ranti Ariyani.

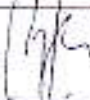

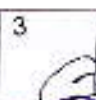
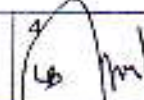
Pembimbing: 1). Arnel Yentifa, SE.Ak., 2). Novrina Chandra, SE.MM.Ak

**ABSTRAK**

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kinerja, posisi keuangan dan arus kas sehingga membantu *stakeholder* dalam memahami laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan untuk memperoleh data di lapangan dengan objek penelitian yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2004-2007. Data diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis yang dipakai adalah *time series technique*, dengan alat ukur berupa analisis pertumbuhan, analisis trend, rasio keuangan, analisis keserasian belanja, analisis arus kas perkomponen, analisis arus kas bebas serta analisis ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan, kinerja dan arus kas Pemerintah Daerah Sumatera Barat cenderung membaik. Hal ini terlihat dari analisis pertumbuhan yang cenderung meningkat, perhitungan dengan menggunakan rasio keuangan yang menunjukkan hasil yang baik dan didukung dengan tingkat ketaatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 Juli 2009  
Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1 	2 	3 	4 
Nama Terang	Amy Fontanela, SE., Ak	Ferdawati, SE., M.Sc., Ak	Guslani, SE., Ak	Arnel Yentifa, SE., Ak

Mengetahui:

Nama Jurusan Nurul Fauzi, SE., MM., Ak.  
Nama



Tanda Tangan

Penulis telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumni:

Alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu dari 33 provinsi yang ada di wilayah Republik Indonesia. Secara geografi, Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi, sebelah timur dengan Provinsi Riau, dan sebelah barat dengan Samudera Hindia. Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan terletak di Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten dan kota.

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional selama satu periode, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama tim anggaran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan belanja, pendapatan, transfer dan pembiayaan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun realisasi atau penggunaan dana yang tertuang dalam APBD harus didukung oleh suatu pertanggungjawaban.

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah tercapai. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2003 pasal 31 yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku

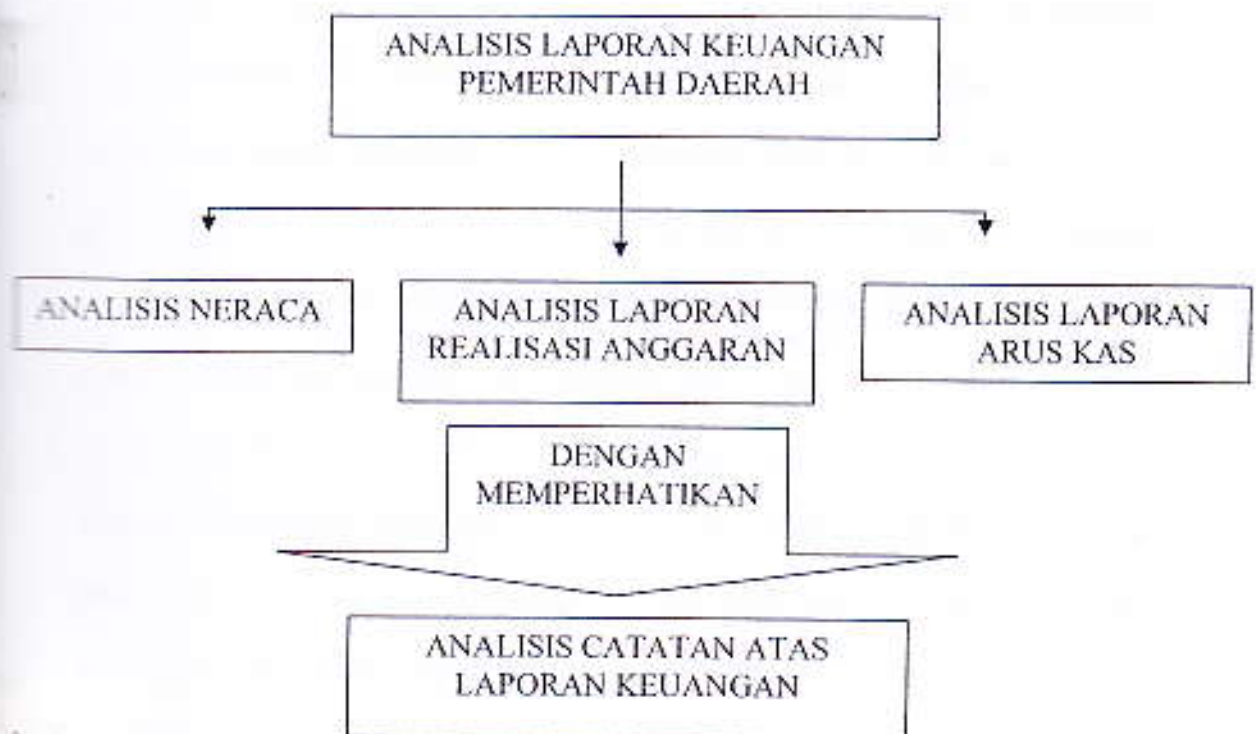
kepentingannya. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu: (Mahmudi, 2007)

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemda dan DPRD.
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berfungsi untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti para eksekutif, legislatif, masyarakat, dan pihak pengucur dana. Laporan ini akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Namun seberapa besar manfaat yang dapat dipetik tergantung pada kualitas laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan tersebut dengan baik. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa tidak semua pemangku kepentingan yang dalam hal ini bertindak sebagai *stakeholder* memahami akuntansi pemerintahan

yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bahkan mungkin ada beberapa pihak yang sama sekali tidak tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu wajar karena para pemangku kepentingan memiliki latar belakang pendidikan yang sangat bervariasi.

Ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.



Gambar 1.1 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Sumber: Mahmudi (2007)

Bagi para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, catatan atas laporan keuangan sangat penting untuk dibaca dan dimanfaatkan dalam

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Untuk laporan keuangan Sumatera Barat tahun 2004-2005 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Untuk analisa pertumbuhan, kinerja tahun 2005 lebih baik dari pada tahun 2004, walaupun belum dapat dikatakan mandiri. Arus kas Sumatera Barat dapat dinilai baik.

Untuk posisi aset, kewajiban dan ekuitas tahun 2006 dan 2007 dinilai cukup aman. Posisi kinerja yang cukup baik juga tergambar dari hasil analisa untuk tahun anggaran 2006 dan 2007. Analisa rasio keuangan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat sampai dengan tahun 2007 masih belum dapat dikatakan mandiri karena sebagian pendapatannya masih di transfer dari pusat. Untuk arus kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dinilai baik.

Pendapatan Pemerintah Daerah Sumatera Barat cenderung naik dari tahun 2004 sampai 2005. Demikian juga belanja yang cenderung naik walaupun pada tahun 2007 ada sedikit penurunan jumlah belanja.

Terhadap APBD yang dikukuhkan dalam Peraturan Gubernur, Pemerintah Sumatera Barat dinilai taat dalam menjalankan APBDnya. Untuk format laporan keuangan tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengacu kepada PP No. 24 tahun 2005. Sedangkan untuk tahun 2006, format laporan keuangan masih mengacu pada Permendagri No. 29 tahun 2002.

## DAFTAR REFERENSI

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. (2007). *Analisis APBD 2007 Kabupaten Pesisir Selatan*. Painan
- Hasan, Iqbal (2002). *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mahmudi. (2007). *Analisis laporan Keuangan Pemerintah daerah*, Yogyakarta: YPKN
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi
- Prasetya, Gede Edy. (2005). *Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Andi
- Pemerintah Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-605 tahun 2008 tentang tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007*
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 44 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2007*
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2007*
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 42 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006*
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. Tahun 2006 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2005*
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2004*
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*